



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 2090-2097

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Legitimasi Kekuasaan dan Ketidakpercayaan Publik terhadap Kepala Daerah : Studi Kasus Demonstrasi Warga Pati dalam Perspektif Manajemen Konflik dan SDGs 16

Maura Alayya Nusantari, Intan Aurellia Evania, Felia Noorlibna Badzlin, Rangga Naim Ansori, Revienda Anita Fitrie, Nuh Krama Hadianto

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Negeri Surabaya

mauraalayya2@gmail.com, intanaurellia02@gmail.com, felia.nb06@gmail.com, rangganaimansori94@gmail.com

Abstrak

Krisis legitimasi kekuasaan kepala daerah menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena memengaruhi kepercayaan publik dan stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis krisis legitimasi kekuasaan kepala daerah di Kabupaten Pati, mengidentifikasi faktor penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat, serta mengkaji konflik sosial yang muncul melalui aksi demonstrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan pemberitaan media yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis legitimasi dipicu oleh kebijakan pemerintah yang dinilai kurang transparan, minim partisipasi publik, serta dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan ketidakpercayaan publik yang ditandai dengan demonstrasi berulang, berkembangnya narasi negatif terhadap pemerintah daerah, dan lemahnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Konflik yang terjadi meliputi konflik kepentingan, konflik komunikasi, dan potensi konflik horizontal antarkelompok masyarakat. Dalam perspektif manajemen konflik, penanganan yang dilakukan pemerintah masih cenderung reaktif dan belum mengedepankan dialog, mediasi, serta partisipasi masyarakat secara inklusif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan transparansi kebijakan, peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, serta perbaikan komunikasi pemerintah daerah untuk memulihkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih demokratis, responsif, dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

Kata kunci: Krisis Legitimasi, Kepercayaan Publik, Konflik Sosial, Demonstrasi, Manajemen Konflik, SDGs 16

1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan sistem demokrasi, legitimasi kekuasaan memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar diterimanya kewenangan dan kebijakan pemerintah oleh masyarakat. Legitimasi tidak hanya terbentuk melalui kemenangan kepala daerah dalam proses pemilihan umum, melainkan juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, keterbukaan terhadap partisipasi publik, serta kesanggupan memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila legitimasi tersebut mengalami penurunan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah turut melemah dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat dari meningkatnya berbagai aksi protes dan demonstrasi yang dilakukan masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan legitimasi tidak hanya berkaitan dengan aspek politik pemerintahan, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial serta kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Krisis legitimasi kekuasaan kepala daerah dapat diamati melalui munculnya berbagai konflik sosial yang berkembang di masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat umumnya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, lemahnya keterbukaan informasi publik, buruknya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, hingga adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak pemerintah daerah. Konflik menjadi semakin kompleks ketika aspirasi masyarakat tidak

Legitimasi Kekuasaan dan Ketidakpercayaan Publik terhadap Kepala Daerah : Studi Kasus Demonstrasi Warga Pati dalam Perspektif Manajemen Konflik dan SDGs 16

ditangani secara tepat sehingga menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam situasi demikian, demonstrasi tidak hanya dimaknai sebagai sarana penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi bentuk ekspresi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi kekuasaan pemerintah daerah. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa lemahnya legitimasi dapat menciptakan hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah dan masyarakat serta menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dan berkeadilan.

Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Pati, dimana beberapa aksi demonstrasi masyarakat muncul sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan masyarakat. Berbagai demonstrasi yang terjadi memperlihatkan adanya ketegangan antara masyarakat dan pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap proses pengambilan kebijakan pemerintah. Kabupaten Pati dipilih sebagai locus penelitian karena daerah tersebut memiliki dinamika konflik sosial yang cukup kompleks dan memperlihatkan keterkaitan yang kuat antara krisis legitimasi kekuasaan dengan munculnya aksi demonstrasi masyarakat. Selain itu, demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Pati melibatkan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang kepentingan yang berbeda-beda, sehingga mencerminkan adanya persoalan dalam aspek komunikasi publik, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan konflik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Kabupaten Pati dianggap relevan untuk dijadikan studi kasus dalam memahami bagaimana krisis legitimasi kekuasaan dapat memunculkan ketidakpercayaan publik dan berkembang menjadi konflik sosial di masyarakat.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena krisis legitimasi kekuasaan kepala daerah tidak hanya berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan proses pembangunan daerah. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-16 yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang kuat. Dalam tujuan tersebut, pemerintah dituntut untuk membangun institusi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat guna meminimalkan potensi konflik sosial serta memperkuat kepercayaan publik. Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai legitimasi kekuasaan dan ketidakpercayaan publik terhadap kepala daerah menjadi relevan untuk memahami bagaimana konflik sosial dapat dikelola melalui pendekatan manajemen konflik agar hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat berjalan lebih harmonis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik secara akademis maupun praktis, terutama dalam upaya pengembangan strategi penyelesaian konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena tidak hanya membahas demonstrasi masyarakat sebagai bentuk konflik sosial ataupun mengkaji legitimasi kekuasaan kepala daerah secara umum. Penelitian ini secara khusus menelaah hubungan antara krisis legitimasi kekuasaan, menurunnya kepercayaan publik, dan berkembangnya konflik sosial yang diwujudkan melalui aksi demonstrasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif manajemen konflik serta dikaitkan dengan SDGs 16 untuk melihat bagaimana upaya penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan transparan. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya legitimasi pemerintah daerah, bentuk-bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepala daerah, serta strategi pengelolaan konflik yang dapat diterapkan guna meredakan konflik sosial antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sudut pandang yang lebih menyeluruh dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas aspek politik atau konflik sosial secara terpisah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis legitimasi kekuasaan kepala daerah yang memicu munculnya ketidakpercayaan publik dan berkembang menjadi konflik sosial berupa demonstrasi masyarakat di Kabupaten Pati. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya legitimasi pemerintah daerah, memahami bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepala daerah, serta menganalisis upaya manajemen konflik yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ketertarikan peneliti terhadap tema ini didasarkan pada semakin seringnya demonstrasi masyarakat terhadap pemerintah daerah yang menunjukkan adanya persoalan serius dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya legitimasi kekuasaan dalam menciptakan pemerintahan daerah yang demokratis, stabil, serta mampu membangun kepercayaan publik sesuai dengan prinsip-prinsip SDGs 16.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Pemilihan studi literatur didasarkan pada fokus penelitian yang menelaah fenomena krisis legitimasi kekuasaan kepala daerah yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik, hingga munculnya konflik sosial berupa aksi demonstrasi masyarakat di Kabupaten Pati. Pendekatan kualitatif digunakan karena objek kajian memiliki karakter yang kompleks, bergantung pada konteks sosial-politik, serta tidak dapat dijelaskan secara numerik, sehingga memerlukan interpretasi mendalam terhadap data deskriptif yang tersedia (Creswell & Poth, 2018). Sementara itu, studi literatur dipilih karena penelitian tidak melibatkan pengumpulan data secara langsung di lapangan, melainkan berfokus pada penelaahan dan sintesis berbagai sumber tertulis untuk membangun pemahaman konseptual maupun empiris secara sistematis (Snyder, 2019).

Fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pada peristiwa demonstrasi masyarakat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang dipahami sebagai indikasi terjadinya krisis legitimasi kekuasaan pemerintah daerah. Pemilihan Kabupaten Pati dilakukan secara purposif karena wilayah ini menunjukkan adanya peningkatan konflik sosial yang dipicu oleh kebijakan publik yang mendapat penolakan dari masyarakat. Berdasarkan berbagai pemberitaan, aksi demonstrasi tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai membebani masyarakat, sehingga memicu aksi protes dalam skala yang cukup luas. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara kebijakan publik, penurunan tingkat kepercayaan masyarakat, dan munculnya konflik sosial dalam bentuk demonstrasi.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, hasil penelitian terdahulu, dokumen kebijakan publik, serta pemberitaan media massa yang berkaitan dengan konflik di Kabupaten Pati. Dalam menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan teori legitimasi Max Weber untuk memahami proses penerimaan kekuasaan oleh masyarakat, serta teori konflik Karl Marx untuk menjelaskan konflik sosial sebagai akibat dari pertentangan kepentingan dalam struktur sosial. Weber menekankan bahwa legitimasi kekuasaan bergantung pada sejauh mana otoritas diterima oleh masyarakat, sedangkan Marx memandang konflik sebagai konsekuensi dari ketimpangan relasi kekuasaan (Weber, 1947; Marx & Engels, 1848). Analisis dokumen digunakan karena metode ini memungkinkan penelusuran makna sosial dari berbagai sumber tertulis secara sistematis dan kontekstual (Bowen, 2009).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, mengelompokkan, dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan keterkaitan dengan tema legitimasi kekuasaan, ketidakpercayaan publik, konflik sosial, serta pendekatan manajemen konflik dan Sustainable Development Goals (SDGs) 16. Seleksi sumber mempertimbangkan aspek kredibilitas, kebaruan, serta kontribusi ilmiah terhadap penelitian (Snyder, 2019).

Analisis data menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, informasi yang tidak relevan dengan isu krisis legitimasi dan konflik di Kabupaten Pati disaring. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi ke dalam bentuk narasi tematik. Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan dengan menggunakan perspektif teori Weber, Marx, serta pendekatan manajemen konflik. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan yang merumuskan keterkaitan antara kebijakan publik, krisis legitimasi, ketidakpercayaan masyarakat, hingga munculnya konflik sosial (Miles et al., 2014).

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi perspektif manajemen konflik untuk menganalisis pola penyelesaian konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Model Thomas & Kilmann (1974) digunakan untuk mengidentifikasi gaya penyelesaian konflik, seperti *competing*, *collaborating*, *compromising*, *avoiding*, dan *accommodating*. Dalam kasus di Kabupaten Pati, konflik menunjukkan kecenderungan eskalatif yang dipengaruhi oleh terbatasnya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, pendekatan negosiasi berbasis kepentingan dari Fisher, Ury, & Patton (1991) digunakan untuk melihat kemungkinan resolusi konflik yang lebih konstruktif. Analisis ini juga dikaitkan dengan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) 16 yang menekankan pentingnya institusi yang inklusif, akuntabel, dan damai dalam pengelolaan konflik sosial (United Nations, 2015).

3. Hasil dan Diskusi

Hasil Penelitian

Hasil kajian menunjukkan bahwa krisis legitimasi kekuasaan kepala daerah di Kabupaten Pati ditandai dengan menurunnya penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Yaitu kebijakan seperti pembangunan industri, pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang wilayah dipersepsikan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Selain itu, proses pembuatan kebijakan dinilai kurang terbuka dan tidak banyak melibatkan masyarakat. Warga merasa tidak diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat, sehingga aspirasi mereka sering tidak diperhatikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan partisipasi dalam pemerintahan belum berjalan dengan baik.

Data dari pemberitaan media daring dan pernyataan publik juga menunjukkan adanya peningkatan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari:

- Munculnya aksi demonstrasi berulang oleh warga, aktivis, dan mahasiswa,
- Berkembangnya narasi negatif di media sosial dan media lokal,
- Serta lemahnya komunikasi politik pemerintah yang dinilai tidak responsif.

Selain itu, demonstrasi yang terjadi memiliki beberapa ciri utama, yaitu:

- Konflik kepentingan antara orientasi pembangunan ekonomi dan tuntutan perlindungan sosial-lingkungan,
- Konflik komunikasi akibat keterbatasan transparansi informasi,
- Serta adanya potensi konflik horizontal di dalam masyarakat.

Serta terdapat temuan lain yang menunjukkan bahwa penanganan konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah aksi demonstrasi terjadi, bukan melalui upaya pencegahan sejak awal.

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa krisis legitimasi kekuasaan kepala daerah di Kabupaten Pati berkembang tidak hanya karena substansi kebijakan pemerintah, tetapi juga karena lemahnya proses komunikasi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks demokrasi lokal, legitimasi kekuasaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka kebijakan pemerintah cenderung dipandang sebagai bentuk kekuasaan yang bersifat sepihak.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara legitimasi formal dan legitimasi sosial. Secara formal, kepala daerah memiliki kewenangan yang sah berdasarkan hasil pemilihan umum dan aturan hukum yang berlaku. Namun, legitimasi sosial hanya dapat diperoleh apabila masyarakat memberikan penerimaan dan kepercayaan terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. Dalam kasus Kabupaten Pati, kebijakan pembangunan industri, pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang wilayah dipersepsikan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat lokal. Persepsi ini memunculkan ketidakpuasan publik yang kemudian berkembang menjadi penolakan sosial.

Dalam perspektif teori legitimasi Max Weber, kekuasaan akan dianggap sah apabila masyarakat memiliki keyakinan bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya secara adil dan sesuai kepentingan bersama. Ketika kepercayaan masyarakat menurun, legitimasi kekuasaan juga akan mengalami pelemahan. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya demonstrasi yang dilakukan warga, mahasiswa, dan kelompok aktivis sebagai bentuk ekspresi ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah. Demonstrasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian aspirasi, tetapi juga simbol adanya jarak antara pemerintah dengan masyarakat.

Selain itu, berkembangnya narasi negatif di media sosial dan media lokal menunjukkan bahwa krisis legitimasi telah memasuki ruang komunikasi publik yang lebih luas. Media sosial pada era digital memiliki peran penting dalam membentuk opini masyarakat. Ketika pemerintah tidak mampu memberikan informasi yang jelas dan terbuka, maka ruang publik akan dipenuhi oleh spekulasi, kritik, bahkan disinformasi yang memperburuk citra

pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi politik pemerintah masih bersifat satu arah dan belum mampu membangun dialog yang efektif dengan masyarakat.

Konflik yang muncul dalam demonstrasi juga memperlihatkan adanya pertentangan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah daerah cenderung menekankan orientasi pembangunan ekonomi dan investasi sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Namun, masyarakat menilai bahwa kebijakan tersebut belum memperhatikan aspek perlindungan sosial dan lingkungan secara memadai. Dalam perspektif Karl Marx, konflik sosial muncul akibat adanya ketimpangan kepentingan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dengan masyarakat yang merasa dirugikan. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut distribusi kekuasaan dan akses masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Di sisi lain, konflik komunikasi juga menjadi faktor penting dalam memperbesar ketegangan sosial. Kurangnya transparansi informasi menyebabkan masyarakat tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai tujuan, manfaat, dan dampak kebijakan pemerintah. Akibatnya, masyarakat cenderung membangun persepsi negatif terhadap pemerintah daerah. Situasi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik belum berjalan secara optimal. Padahal, transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

Penelitian ini juga menemukan adanya potensi konflik horizontal di tengah masyarakat. Perbedaan pandangan antara kelompok yang mendukung pembangunan dengan kelompok yang menolak kebijakan tertentu berpotensi menimbulkan polarisasi sosial. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat memicu perpecahan di tingkat masyarakat dan memperburuk stabilitas sosial daerah. Oleh karena itu, konflik yang terjadi tidak hanya bersifat vertikal antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi konflik horizontal antarkelompok masyarakat.

Dalam perspektif manajemen konflik, penanganan konflik yang dilakukan pemerintah daerah masih cenderung bersifat reaktif. Pemerintah baru merespons setelah demonstrasi atau penolakan publik terjadi, bukan melalui langkah preventif sejak tahap awal penyusunan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki mekanisme pengelolaan konflik yang efektif. Padahal, konflik sosial seharusnya dapat dicegah melalui komunikasi yang terbuka, konsultasi publik, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann menjelaskan bahwa salah satu bentuk penanganan konflik yang kurang efektif adalah gaya *avoiding* atau menghindari konflik. Dalam konteks Kabupaten Pati, kecenderungan tersebut terlihat dari minimnya dialog preventif antara pemerintah dengan masyarakat sebelum konflik berkembang menjadi aksi demonstrasi. Pemerintah lebih banyak mengambil langkah setelah tekanan publik meningkat. Akibatnya, konflik yang semula dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mediasi justru berkembang menjadi ketegangan sosial yang lebih besar.

Selain itu, pendekatan negosiasi berbasis kepentingan sebagaimana dikemukakan oleh Roger Fisher dan William Ury juga belum diterapkan secara optimal. Pemerintah dan masyarakat masih cenderung mempertahankan posisi masing-masing tanpa membangun komunikasi yang berorientasi pada kepentingan bersama. Padahal, pendekatan dialogis sangat penting untuk menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis legitimasi kepala daerah di Kabupaten Pati terjadi karena kombinasi antara kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat, lemahnya transparansi, rendahnya partisipasi publik, serta buruknya komunikasi pemerintah. Kondisi tersebut memicu meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat yang diwujudkan melalui demonstrasi dan berkembangnya konflik sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat transparansi kebijakan, membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, serta membangun komunikasi politik yang lebih responsif dan inklusif agar legitimasi pemerintahan dapat dipulihkan dan stabilitas sosial daerah tetap terjaga.

Pembahasan

Penelitian menunjukkan bahwa krisis legitimasi kepala daerah di Kabupaten Pati tidak hanya berkaitan dengan kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga dengan proses pembuatannya. Dalam perspektif teori legitimasi, kondisi ini mencerminkan lemahnya legitimasi normatif, di mana kebijakan tidak lagi dipandang selaras dengan nilai keadilan sosial oleh masyarakat.

Ketidakpercayaan publik yang muncul memperlihatkan adanya kesenjangan antara legitimasi formal dan legitimasi sosial. Fenomena ini juga dapat dianalisis melalui perspektif Max Weber (1978) yang menjelaskan bahwa legitimasi kekuasaan dapat terbentuk dari kepercayaan masyarakat terhadap otoritas yang berkuasa. Ketika kepercayaan tersebut menurun, maka legitimasi juga turut melemah. Pemerintah daerah secara legal tetap memiliki kewenangan, namun kehilangan kepercayaan masyarakat sebagai basis utama legitimasi dalam sistem demokrasi. Dinamika demonstrasi yang terjadi dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi kolektif atas krisis legitimasi tersebut, dalam pandangan Karl Marx (1867) kondisi tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk konflik kepentingan antara kelompok penguasa dan masyarakat. Konflik ini muncul ketika kebijakan dinilai lebih mengutamakan pihak tertentu sehingga memicu resistensi sosial. Demonstrasi bukan hanya reaksi terhadap kebijakan tertentu, tetapi juga refleksi dari kegagalan institusi dalam membangun komunikasi yang efektif dan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang muncul tidak semata-mata hanya bersifat material, tetapi juga bersifat struktural dan komunikatif.

Dalam perspektif manajemen konflik, respons pemerintah daerah yang cenderung reaktif menunjukkan bahwa pengelolaan konflik belum terlaksana secara optimal. Secara konseptual, pengelolaan konflik yang efektif seharusnya mencakup tahapan pencegahan melalui transparansi dan partisipasi publik, penanganan melalui dialog serta mediasi, dan pemulihan melalui penguatan kepercayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Max Weber (1978) menegaskan bahwa birokrasi ideal perlu dijalankan secara rasional, transparan, dan responsif. Selain itu, Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann (1974) mengklasifikasikan gaya penanganan konflik ke dalam lima bentuk, yaitu *competing*, *collaborating*, *compromising*, *avoiding*, dan *accommodating*. Dalam konteks Kabupaten Pati, kecenderungan yang terlihat lebih mengarah pada gaya *avoiding* serta tindakan yang bersifat reaktif, yang ditandai dengan minimnya dialog preventif sebelum konflik berkembang menjadi aksi demonstrasi. Di sisi lain, Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton (1991) menekankan pentingnya negosiasi berbasis kepentingan (*interest-based negotiation*), yaitu komunikasi yang berfokus pada kepentingan bersama dibandingkan posisi yang saling bertentangan. Namun demikian, pendekatan ini belum diterapkan secara optimal sehingga upaya pencegahan eskalasi konflik sejak tahap awal masih kurang efektif. Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak terpenuhi, tingkat kepercayaan publik cenderung menurun dan berpotensi memperbesar konflik. Kondisi ini juga berdampak pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Sustainable Development Goals poin 16 yang menekankan pentingnya institusi yang damai, adil, dan inklusif, karena meningkatnya konflik sosial menunjukkan bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya terwujud.

Selain itu, penting dipahami bahwa legitimasi pemerintahan daerah pada dasarnya bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan respons masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan. Legitimasi tidak hanya dibangun melalui prosedur pemilihan kepala daerah, tetapi juga melalui praktik pemerintahan sehari-hari yang mencerminkan akuntabilitas, keterbukaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik. Ketika pemerintah gagal memenuhi harapan masyarakat, maka legitimasi yang dimiliki akan mengalami penurunan secara bertahap. Dalam konteks Kabupaten Pati, kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya jarak antara pemerintah dengan masyarakat yang ditandai oleh lemahnya komunikasi, rendahnya partisipasi publik, dan meningkatnya ketidakpercayaan sosial.

Krisis legitimasi juga dapat dipahami melalui konsep *governance* atau tata kelola pemerintahan. Prinsip *good governance* menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, efektivitas, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa prinsip tersebut belum berjalan secara optimal. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan menyebabkan masyarakat merasa hanya menjadi objek pembangunan, bukan subjek yang memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan daerah. Padahal, partisipasi publik merupakan elemen penting dalam demokrasi lokal karena dapat meningkatkan kualitas kebijakan sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah.

Dalam praktiknya, keterbukaan informasi publik juga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ketika informasi mengenai kebijakan, dampak pembangunan, maupun proses pengambilan keputusan tidak disampaikan secara jelas, maka ruang publik akan mudah dipenuhi oleh asumsi dan informasi yang tidak terverifikasi. Situasi ini memperbesar potensi munculnya disinformasi dan mempercepat berkembangnya narasi negatif terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, komunikasi publik tidak cukup hanya bersifat formal administratif, tetapi juga harus mampu membangun dialog dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan memperoleh penjelasan secara langsung.

Peran media sosial dalam dinamika konflik juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Media sosial saat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang pembentukan opini publik. Narasi negatif yang berkembang secara masif di media sosial dapat memperkuat persepsi masyarakat mengenai buruknya kinerja pemerintah daerah. Di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi alat mobilisasi massa dalam aksi demonstrasi. Hal ini menunjukkan bahwa krisis legitimasi pada era digital berkembang lebih cepat karena opini publik dapat terbentuk dan menyebar secara luas dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memiliki strategi komunikasi digital yang lebih adaptif, terbuka, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa demonstrasi yang terjadi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi dalam menyampaikan aspirasi publik. Dalam negara demokratis, demonstrasi pada dasarnya merupakan hak masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Namun, demonstrasi yang terjadi secara berulang menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan. Artinya, aksi demonstrasi bukan hanya bentuk penolakan sesaat, tetapi menjadi indikator bahwa terdapat masalah mendasar dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa solusi yang tepat, maka legitimasi pemerintah akan semakin melemah dan konflik sosial berpotensi meningkat.

Dari sisi kelembagaan, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme konsultasi publik sebelum kebijakan strategis ditetapkan. Forum musyawarah, dialog publik, audiensi masyarakat, maupun pelibatan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang lebih inklusif. Pendekatan partisipatif tidak hanya penting untuk mengurangi konflik, tetapi juga membantu pemerintah memperoleh masukan yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih diterima oleh publik karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembentukannya.

Lebih lanjut, penguatan kapasitas birokrasi juga menjadi hal yang penting dalam mengatasi krisis legitimasi. Aparatur pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan komunikasi publik, mediasi konflik, dan manajemen partisipasi masyarakat. Selama ini birokrasi sering dipandang terlalu administratif dan kurang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Padahal, dalam konteks pemerintahan modern, birokrasi dituntut untuk mampu menjadi fasilitator yang menjembatani kepentingan pemerintah dengan masyarakat. Dengan birokrasi yang lebih terbuka dan profesional, potensi konflik sosial dapat diminimalisasi sejak tahap awal.

Dalam jangka panjang, upaya pemulihan legitimasi pemerintah daerah memerlukan komitmen politik yang kuat untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan inklusif. Transparansi kebijakan harus diwujudkan melalui keterbukaan informasi yang mudah diakses masyarakat. Partisipasi publik harus diperluas tidak hanya sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, komunikasi pemerintah perlu diarahkan pada pendekatan dialogis yang mengedepankan empati, responsivitas, dan penyelesaian masalah secara bersama-sama.

Dengan demikian, krisis legitimasi kepala daerah di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari terlaksananya program pembangunan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun kepercayaan dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Legitimasi yang kuat akan menciptakan stabilitas sosial, meningkatkan efektivitas kebijakan, serta mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis, adil, dan berkelanjutan. Sebaliknya, apabila krisis legitimasi terus diabaikan, maka konflik sosial akan semakin sulit dikendalikan dan dapat menghambat proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, dapat dilihat adanya hubungan yang saling terkait: kebijakan yang tidak terbuka menyebabkan turunnya kepercayaan, kemudian memicu demonstrasi, dan akhirnya memperburuk legitimasi pemerintah. Jika tidak diperbaiki, kondisi ini akan terus berulang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi, membuka ruang partisipasi masyarakat, dan memperbaiki komunikasi publik. Langkah ini penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, krisis legitimasi kekuasaan kepala daerah di Kabupaten Pati menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara kebijakan publik yang kurang transparan dan partisipatif dengan menurunnya kepercayaan masyarakat serta meningkatnya konflik sosial dalam bentuk aksi demonstrasi. Melemahnya legitimasi tidak hanya dipengaruhi oleh substansi kebijakan yang dinilai belum berpihak pada kepentingan

masyarakat, tetapi juga oleh proses perumusannya yang belum mampu membangun komunikasi yang efektif dan inklusif. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara legitimasi formal dan legitimasi sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber (1978), serta menunjukkan adanya konflik kepentingan struktural sebagaimana dikemukakan oleh Karl Marx (1867). Dalam perspektif manajemen konflik, penanganan yang cenderung reaktif dengan dominasi pendekatan avoiding menurut Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann (1974) mengindikasikan bahwa upaya pencegahan konflik belum berjalan secara optimal. Selain itu, belum maksimalnya penerapan negosiasi berbasis kepentingan sebagaimana dikemukakan oleh Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton (1991) turut memperbesar potensi eskalasi konflik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi, peningkatan partisipasi publik, serta perbaikan komunikasi pemerintah yang lebih inklusif dan responsif sebagai bagian dari strategi pengelolaan konflik yang komprehensif guna memulihkan kepercayaan masyarakat dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang selaras dengan prinsip Sustainable Development Goals poin 16 mengenai institusi yang damai, adil, dan inklusif.

Referensi

1. Alfito. (2024). *Statistika Penelitian: Konsep dan Kasus*. Medan: UMA Press.
2. Alfian, A. (2021). Analisis Pengaruh Harga, Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Loyalitas Konsumen. *Revolusi Indonesia*, 1(11), 1183–1189. <https://repository.mikroskil.ac.id/id/eprint/1340/>
3. Alsas Pridayanto, & Farida Farida. (2025). Analisa Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Pelanggan Restoran. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 4(April), 636–643. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol4.2025.385>
4. Area, U. M. (2024a). Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Konsumen Di Toko Et45 Music Store.
5. Area, U. M. (2024b). Sepeda Motor Matic Merek Honda Beat Pada Pt . Astra Honda Motor Cabang Aksara (Aksara Motor) Medan Sumatera Utara Skripsi Oleh : Adelia Febrianto Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan Merek Honda Beat Pada Pt . Astra Honda Motor Caban.
6. Basuki, K. (2019). Penelitian menurut beberapa ahli. ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id
7. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
8. Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
9. Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (1991). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in* (2nd ed.). Penguin Books.
10. Kilmann, R. H., & Thomas, K. W. (1974). Developing a forced-choice measure of conflict-handling behavior: The “MODE” instrument. *Educational and Psychological Measurement*, 37(2), 309–325.
11. Marx, K., & Engels, F. (1848). *The communist manifesto*.
12. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
13. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
14. United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
15. Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization* (A. M. Henderson & T. Parsons, Trans.). Oxford University Press.